



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Afiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romli Atmasasmitha, 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar hukum Dalam Konteks penegakkan Hukum di Indonesia*, PT alaumni, Bandung
- Azwar, Saifudin, 2005, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Effendi, Masyhur dan Taufani S. Evandri, 2010, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fatah, Abdoel, 2005, *Demiliterisasi Tentara*, LKIS, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Loqman, Loebby, 1985, *Peradilan di Indonesia*, Ghalia, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhtad, Majda el, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Oetojo Oesman dan Alfian, 1991, *Pancasila Sebagai Ideologi*, Percetakan Negara R.I, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Salam, Moch. Faisal, 1994, *Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.



- 1996, *Hukum Acara Peradilan Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- 1996, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soegiri, dkk, 1976, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer Di Negara republik Indonesia*, CV Indra Djaja, jakarta.

Subroto, Djoko, 1998, *Visi Abri Menatap Masa Depan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Supardi, Yogi, 2012, *Pertahanan Negara Indonesia Oleh Bangsa Indonesia dengan Cara Indonesia*, Yogyakarta.

Tanusubroto, S, 1983, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.

Tim PERADI untuk RUU KUHAP, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Akusatorial dan Adversial*, Jakarta, Papas Sinar Sinanti bekerja sama dengan PERADI.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5591.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No: M. 14 PW 17.03 Tahun 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.



### C. Sumber Jurnal, Karya Ilmiah, dan Internet

- Setiyono, “Kajian Yuridis Mengenai Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Pelaksanaan Praperadilan”, *Lex Jurnalica*, Volume. 4 No.1, 10 Desember 2006
- Suadi, Atma, “Perwira TNI Merupakan Bagian Masyarakat Indonesia”, *Majalah Akademi TNI*, 2000.
- Baso Hakim, Zulkarnain, 2014, “Politik Penegakan Hukum Pidana dalam Peradilan Militer”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gunawan, Andrie, 2013, “Penyelesaian Perbedaan Pendapat Antar Perwira Penyerah Perkara Dan Oditur Militer Dalam Perkara Pidana Di Wilayah Hukum Pengadilan II-II Yogyakarta”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Hamdallai, M. Andika Haris, 2016, “ Dasar Pemikiran Konsep Hakim Komisaris Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setiawan, Irfan, 2014, “Reformasi Peradilan Militer Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia”, *Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Setyadi, Niko Bobi, 2011, “ Eksistensi Perwira Penyerah Perkara Dalam Sistem Peradilan Pidana militer”, *Tesis*, Magister Litigasi, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Aris Kurniawan, “Sejarah Tentara Nasional Indonesia”, <http://www.gurupendidikan.com/sejarah-terbentuknya-tentara-nasional-indonesia-menurut-ahli-sejarah/>, diakses pada 13 Juli 2017.
- Didik Endro Purwoleksono, “Naskah Akademik Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, [http://www.bphn.go.id/data/documents/renkum\\_na2010.pdf](http://www.bphn.go.id/data/documents/renkum_na2010.pdf), di akses pada 28 Juni 2017.
- Iffah Nur Arrifah, “Vonis Cebongan dan Impunitas TNI”, <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/radio/onairhighlights/vonis-cebongan-dan-impunitas-tni/1188429>, diakses pada 25 Desember 2016.
- Pengadilan Negeri Bantul, “Statistik Perkara 2016”, [Sipp.pn.bantul.go.id/statistik-perkara](http://sipp.pn.bantul.go.id/statistik-perkara), diakses pada 20 juni 2017.



Pusat Penerangan TNI, “Sejarah TNI”, <http://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, diakses pada 05 Desember 2016.

#### **D. Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011, perihal pengujian Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 1 Mei 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, perihal pengujian Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1), Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Maret 2015.